

**PROSEDUR PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2019
PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK
NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara**

DISUSUN OLEH:

**NAMA : REZZA SURYA NUGRAHA
NPM : 1732028173
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

**POLITEKNIK STIALAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : REZZA SURYA NUGRAHA
NPM : 1732028173
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH TAHUN 2019 PADA BIRO
KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 10 Mei 2021

Pembimbing



(Adriwati, S.E., D.E.A.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 2 Juni 2021.

Ketua merangkap anggota,




Agus Inarto, S.E., M.M.

Sekretaris merangkap anggota



Bambang Suhartono, S.Sos., M.E.

Anggota



Adriwati, S.E., D.E.A.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rezza Surya Nugraha

NPM : 1732028173

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Prosedur Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikina pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 2 Juni 2021

Penulis,



(Rezza Surya Nugraha)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan sumber dari segala sumber, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Prosedur Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Adriwati, S.E., D.E.A., selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membuka ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan gagasan dan buah pikir dalam penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Bapak Drs. Agoes Inarto, M.M., dosen Administrasi Bisnis Sektor Publik Politeknik STIA LAN Jakarta, yang dengan penuh semangat memberikan dorongan bagi penulis untuk lebih giat membuka wawasan baik dilingkup pekerjaan maupun penulisan skripsi tugas akhir ini.

3. Bapak Faisal Syahrul, S.E., M.Pd., Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait bantuan pemerintah.
4. Ibu Dewi Fitriany, S.E., M.Si., Bapak Ferdian Amran, S.IP., M.Pd., Bapak Taopiq, S.Pd., M.M., dan rekan-rekan dari Biro Keuangan dan BMN yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
5. Maria Dwi Septiana, Samuel Eka Nugraha (†), Faustina Teresa Risti Nugraha dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
6. Rekan-rekan kuliah jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis terutama dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Keuangan dan BMN serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 2 Juni 2021

Penulis

(RSN)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rezza Surya Nugraha

NPM : 1732028173

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Prosedur Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikina pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 2 Juni 2021

Penulis,

(Rezza Surya Nugraha)

ABSTRAK

Rezza Surya Nugraha, 1732028173

**PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN
2019 PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Skripsi, x hlm, 82 halaman

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Biro Keuangan dan BMN yang merupakan salah satu unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal menyelenggarakan penyaluran bantuan pemerintah bagi institusi pendidikan dan masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019. Penelitian bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditinjau dari tiga aspek yaitu mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek mekanisme penyaluran bantuan pemerintah terdapat POS yang perlu ditambahkan informasi bahwa penerima bantuan pemerintah ini dikhususkan untuk sekolah yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya dalam aspek jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah perlu adanya peninjauan kembali jenis dan sasaran bantuan pemerintah, mengingat adanya kemungkinan adanya terjadi kurang tepatnya penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Kemudian dalam aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah diharapkan adanya aplikasi yang dapat diakses oleh para penerima bantuan agar dapat memantau perjalanan berkasnya.

Kata kunci: Prosedur, Bantuan Pemerintah

ABSTRACT

Rezsa Surya Nugraha, 1732028173

**GOVERNMENT ASSISTANCE DISTRIBUTION PROCEDURE
IN 2019 IN THE FINANCIAL AND STATE OWNED ASSET
BUREAU, SECRETARIAT GENERAL, MINISTRY OF
EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY**

Thesis, x pages, 82 pages

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, through the Finance and State Owned Asset Bureau, which is one of the echelon II units under the Secretariat General, organizes the distribution of government assistance to educational institutions and communities engaged in education and culture based on the Regulation of the Secretariat General of the Ministry of Education and Culture Number 14 of 2018 concerning Technical Guidelines Government Assistance to the Finance Bureau in 2019. The research aims to determine the procedure for distributing government assistance in 2019 at the Finance and State Owned Asset Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, which is viewed from three aspects, namely the mechanism for channeling government assistance, types of assistance and targets for receiving government assistance, and monitoring implementation. and evaluation of government assistance.

The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review. The research instruments used were interview guides and document review guides.

The results show that in the aspect of the mechanism for distributing government assistance, there is a Procedure Operational Standard that needs to be added information that the recipient of this government assistance is specifically for schools that are registered in the main education data of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Furthermore, in the aspect of types of assistance and targets for receiving government assistance, it is necessary to have a review of the types and targets of government assistance, given the possibility of inaccurate distribution of government assistance. Then in the aspect of implementing monitoring and evaluation of government assistance, it is hoped that the application obtained will be accessed by beneficiaries so that they can tracking the journey of their files.

Keywords: *Procedure, Government Assistance*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Bagi Kepentingan Dunia Akademik	8
2. Bagi Kepentingan Dunia Publik	8
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Keuangan Negara.....	10
2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara	13
3. Prosedur	22
4. Bantuan Pemerintah	25
B. Konsep Kunci.....	37
C. Model Berpikir.....	39
D. Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	40
B. Teknik Pengumpulan Data.....	45
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data	46
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data.....	51

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	53
1. Sejarah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	53
2. Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	55
3. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	59
4. Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	61
B. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	63
1. Aspek Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah.....	63
2. Aspek Jenis Bantuan dan Sasaran Penerima Bantuan Pemerintah	68
3. Aspek Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pemerintah	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Alur Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	31
2. Model Berpikir Penelitian.....	39
3. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	60
4. Potensi Pemetaan Masalah dalam Alur Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	64
5. Perbandingan Realisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah per Jenis Belanja (jenis bantuan) dari Tahun 2016 sampai dengan 2019	69

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain pendidikan nasional, dalam UUD 1945 pasal 32 juga mengamanatkan agar negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah membentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dibentuk pertama kali pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sampai saat ini telah mengalami enam kali perubahan nomenklatur. Dasar pembentukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada kabinet Indonesia Maju ini adalah Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 dituliskan bahwa, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa, “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu memberikan Bantuan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi pemerintah/masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pasal 7 huruf mm, mempunyai tugas, "melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pemberian bantuan pemerintah kepada lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan."

Sehubungan hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengamanatkan kepada salah satu unit eselon I di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu Biro Keuangan dan Barang Milik Negara untuk ikut berperan dalam meringankan beban masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan salah satunya dengan pemberian bantuan pemerintah bagi masyarakat penggerak pendidikan dan kebudayaan. Bantuan pemerintah ini adalah satu-satunya bantuan yang berada di Sekretariat Jenderal.

Bantuan pemerintah yang dikelola oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara adalah sarana untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Jenis Bantuan pada Biro Keuangan meliputi bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, serta bantuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun masih banyak terdapat beberapa masalah terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan BMN, Setjen, Kemendikbudristek. Petunjuk teknis yang dijadikan sebagai pedoman untuk pengelolaan bantuan pemerintah diunggah pada laman

simkeu.kemdikbud.go.id, namun nampaknya masih belum efektif dan belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan tidak tersebarnya bantuan pemerintah dari Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara merata ke seluruh Indonesia.

Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Aspek mekanisme perlu diteliti karena pada aspek ini adalah sisi yang rawan dengan campur tangan pihak ketiga, sehingga harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan. Banyak kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia karena minimnya pemahaman dalam penyusunan mekanisme penyaluran. Selain itu, jenis dan sasaran penerima bantuan-pun harus dapat dikelompokkan mengingat bantuan ini bersifat pendukung dari bantuan pemerintah yang lain. Sedangkan untuk aspek monitoring, perlu digali mengingat pemohon bantuan memerlukan kepastian informasi terkait dengan jejak berkas atau proposal pengajuan bantuan yang dikirimkan misalnya sampai dimana perjalanan berkas yang telah dikirimkan pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, apakah berkas tersebut sudah diverifikasi atau belum, lolos verifikasi atau tidak, serta apabila lolos membutuhkan berapa lama dari proses lolos, penyusunan SK hingga tahap penandatanganan perjanjian kerja sama dan pencairan dana.

Pernandatanganan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga pasal 16:

pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Prosedur Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi."

B. Fokus Permasalahan

Terkait dengan beberapa produk hukum yang mengatur mengenai penyaluran bantuan pemerintah, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga. Pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016 tersebut pengguna anggaran (menteri) harus menyusun pedoman umum dan pedoman teknis untuk penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan kementerian lembaganya serta menunjuk pejabat eselon I untuk bertanggung jawab terhadap program dan penyusunan pedoman teknis penyaluran bantuan pemerintah tersebut.

Berdasarkan amanat tersebut maka Sekretaris Jenderal menyusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dilakukan revisi sebagian menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa peraturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dituliskan pada latar belakang serta dukungan dari sisi produk hukum terkait dengan penyaluran Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut rumusan permasalahan yang akan penulis teliti antara lain:

1. Bagaimana proses mekanisme penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
2. Apa saja jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?
3. Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penyaluran Bantuan Pemerintah terkait:

1. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tahun 2019 penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal prosedur penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan Kemendikbud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Kepentingan Dunia Akademik

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

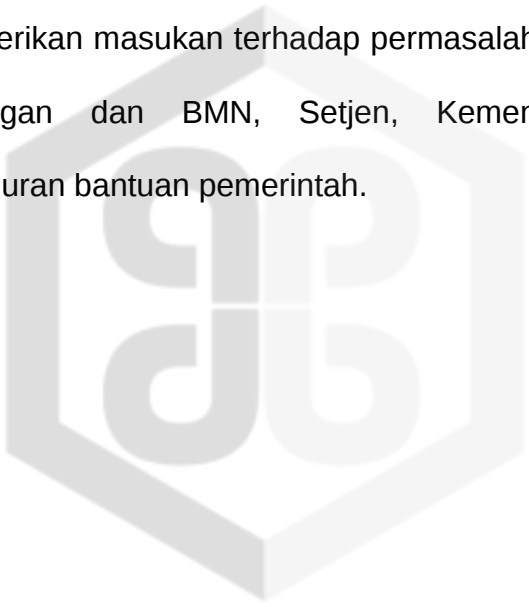
- a. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan Bantuan Pemerintah.

2. Bagi Kepentingan Dunia Publik

Penelitian ini dapat bermanfaat, dalam hal:

- a. Memberikan fakta mengenai pengelolaan penyaluran bantuan pemerintah Tahun 2019 pada Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbudristek;

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan prosedur penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbudristek; dan
- c. Memberikan masukan terhadap permasalahan yang dialami Biro Keuangan dan BMN, Setjen, Kemendikbudristek dalam penyaluran bantuan pemerintah.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**